

SejarahKita – Sejarah Indonesia Kelas 12 SMA



Rangkuman Materi Pembelajaran

Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Disintegrasi dari Ideologi, Kepentingan, dan Sistem Pemerintahan.

<https://sejarahkita.my.id/summary>



Daftar Isi

- Definisi
- Penyebab
- Contoh
- Dampak
- Pencegahan



Objek Pembahasan



PKI Madiun 1948 dan G30S PKI



DI/TII



APRA



Andi Azis



RMS



PRRI dan Permesta

Definisi



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; perpecahan.

Indonesia tergolong rentan mengalami disintegrasi nasional karena masyarakatnya yang heterogen (beraneka ragam perbedaan) secara suku, ras, agama, bahasa, kebudayaan, dan aspek latar belakang lainnya berdasarkan daerah asal masyarakat. Disintegrasi sangat berbahaya karena dapat mengancam stabilitas suatu negara.



Penyebab

Banyak faktor yang berpotensi memicu terjadinya disintegrasi, diantaranya yaitu:

1. Adanya serangan dari ideologi lain terhadap ideologi Pancasila yang dianut oleh Warga Negara Indonesia.
 2. Rendahnya rasa menghargai dan menghormati keanekaragaman perbedaan latar belakang antar masyarakat.
 3. Tidak ada kesadaran pada masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar negeri, misalnya terorisme ataupun masuknya budaya asing yang bertentangan dengan nilai budaya lokal.
 4. Ketidakpuasan karena adanya ketimpangan hasil-hasil pembangunan.
- 
- 

Contoh

Telah terjadi beberapa kasus disintegrasi pada beberapa tahun lalu, contohnya seperti:

1. Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948 dan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI)
 - Latar Belakang →
Peristiwa Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948 merupakan konflik kekerasan antara Front Demokrasi Rakyat (FDR) terhadap Pemerintah Indonesia. Bermula dari pemberhentian kabinet Amir Syarifuddin yang gagal dalam Perundingan Renville dan dibentuknya Kabinet Mohammad Hatta. Amir Syarifuddin yang sakit hati pun merespons dengan mendirikan FDR berisi 3 partai besar komunis dengan tujuan menggulingkan Kabinet Mohammad Hatta. Sedangkan, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) merupakan gerakan sabotase yang dipimpin oleh D. N. Aidit terhadap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dengan menculik dan membunuh 6 Jenderal dan 1 Perwira TNI-AD, yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, dan Lettu Pierre Andreas Tendean. karena usulan pembentukan angkatan ke-5 oleh PKI ditolak.

Contoh (lanjutan)

- Tujuan →

Pembentukan PKI Madiun 1948 ditujukan untuk mendirikan negara Republik Indonesia Soviet, menggeser Pancasila menjadi komunis, dan mengajak para buruh dan petani untuk mendukung aksi pemberontakan. Sedangkan, G30S PKI bertujuan untuk meng kudeta kepemimpinan Presiden pertama RI, yaitu Dr. Ir. H. Soekarno agar dapat menguasai Indonesia dan mengubahnya menjadi negara komunis.

- Tindakan Penyelesaian →

Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun 1948, Dr. Ir. H. Soekarno meminta rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atau Muso-Amir. Selain itu, adanya pengutusan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur oleh Panglima Besar Sudirman untuk menjalankan operasi penumpasan dengan dibantu para Santri. Akhirnya, pada 20 September 1948 dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Jendral Abdul Harris Nasution. Dalam operasi ini, Muso, Amir Syarifuddin, dan para tokoh komunis lainnya dijatuhi hukuman mati. Sedangkan, untuk mengatasi pemberontakan G30S PKI, dijalankanlah Operasi Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Operasi Trisula di Blitar Selatan, serta Operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang membuahkan hasil bahwa para tokoh PKI berhasil ditangkap. D. N. Aidit juga ditemukan tewas tertembak akibat operasi tersebut. Lalu, tokoh PKI lainnya dikenakan hukuman mati.

Contoh (lanjutan)

2. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

- Latar Belakang →

Di Jawa Barat, pemberontakan DI/TII dilatarbelakangi oleh kekecewaan pasukan Hisbullah dan Fisabilillah terhadap hasil perundingan Renville karena diperintahkan untuk hengkang dari Jawa Barat. Kemudian, di Jawa Tengah, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin Kartosuwiryo. Selanjutnya, di Sulawesi Selatan dilatarbelakangi oleh kekecewaan Kahar Muzakar karena pasukannya yang tergabung dalam Komando Giliya tidak dimasukkan ke Angkatan Perang Republik Indonesia (APRIS). Lalu, di Kalimantan Selatan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk bergabung dengan NII yang dipimpin Kartosuwiryo. Selain itu, di Aceh dilatarbelakangi oleh kekecewaan rakyat Aceh karena status Aceh yang diturunkan menjadi Keresidenan dibawah Sumatera Utara.

Contoh (lanjutan)

- Tujuan →

Di Jawa Barat, bertujuan untuk mendirikan negara dengan dasar syariat Islam berupa Al-Qur'an dan Hadist di Indonesia, menolak Perjanjian Renville, dan mengatasi dominasi Komunis dan Sosialis. Kemudian, di Jawa Tengah bertujuan untuk mendirikan negara berbasis syariat Islam demi mengatasi komunis dan sosialisme. Selanjutnya, di Sulawesi Selatan bertujuan untuk mengukuhkan Syariat Islam sebagai dasar negara dan tidak dapat menerima hasil bahwa anggota Tentara Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan ditolak bergabung sebagai Tentara RI. Lalu, di Kalimantan Selatan bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat agar diperhatikan oleh pemerintahan Orde Lama. Selain itu, di Aceh bertujuan untuk mengembalikan Otonomi Aceh, mencegah kekuasaan Uleebalang kembali, dan menegakkan Syariat Islam.

Contoh (lanjutan)

- Tindakan Penyelesaian →

Di Jawa Barat, diatasi dengan Operasi Pagar Betis dengan strategi militer yang melibatkan kekuatan rakyat. Pada Juni 1962, pasukan Divisi Siliwangi berhasil menangkap Kartosuwiryo untuk divonis hukuman mati. Kemudian, di Jawa Tengah diatasi dengan pembentukan komando Operasi Militer pada Januari 1950 oleh Pemerintah, yaitu Gerakan Benteng Nasional yang berhasil mengalahkan DI/TII pada Juni 1954. Selanjutnya, di Sulawesi Selatan diatasi dengan serbuan pasukan Batalyon 330/Kujang Siliwangi yang berhasil menembak mati Kahar Muzakar. Lalu, di Kalimantan Selatan diatasi dengan cara operasi militer yang berhasil membuat Ibnu Hajar tertangkap. Selain itu, di Aceh diatasi dengan mendatangkan pasukan dari Sumatra Utara dan Sumatra Tengah yang berhasil memukul mundur pasukan TII Aceh hingga ke hutan serta Daud Beureueh menerima hasil musyawarah dari Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diadakan pada 17 s.d. 28 Desember 1962.

Contoh (lanjutan)

3. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

- Latar Belakang →

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) adalah kelompok milisi pro-Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. Pemberontakan ini terjadi di Bandung pada 23 Januari 1950 dibawah kendali Kapten Raymond Westerling. Pemicu meletusnya pemberontakan ini yakni hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Agustus 1949 mengenai Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia dan Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) akan dibubarkan untuk digabungkan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Disamping itu, juga terdapat niat Belanda yaitu berupa kepentingan ekonomi di Indonesia melalui eksploitasi sumber daya untuk mempertahankan keadaan ekonominya.

Contoh (lanjutan)

- Tujuan → Mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, yaitu negara Pasundan. Pada saat itu, banyak negara bagian yang lain membubarkan diri dan melebur dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, juga bermaksud untuk mengganggu proses pengakuan kedaulatan NKRI oleh Belanda dan mempertahankan keberadaan Tentara APRA sebagai Tentara di Pasundan.
- Tindakan Penyelesaian → Kegagalan kudeta yang dilakukan Kapten Raymond Westerling terhadap RIS menyebabkan demoralisasi anggota milisi dan ia pun terpaksa melarikan diri ke Belanda, sehingga APRA pun runtuh karena kehilangan sosok pemimpin seperti Kapten Raymond Westerling dan dihapuskan pada Februari 1950.

Contoh (lanjutan)

4. Andi Azis

- Latar Belakang →
Peristiwa pemberontakan ini terjadi pada 5 April 1950 di Makassar. Tokoh yang terlibat sebagai pemicu dalam peristiwa pemberontakan ini ialah Kapten Andi Abdul Azis yang merupakan mantan Perwira Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL).
- Tujuan →
Menolak masuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) karena bertekad mempertahankan keutuhan Negara Indonesia Timur (NIT) dan tidak ingin bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Contoh (lanjutan)

- Tindakan Penyelesaian →

Pada 8 April 1950, Pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan Andi Azis untuk segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam waktu 4 x 24 jam sekaligus menarik seluruh pasukannya dan menyerahkan senjata beserta membebaskan para sandera. Karena Andi Azis tidak memedulikan ultimatum tersebut, maka pada 26 April 1950 dikerahkanlah pasukan militer yang dipimpin oleh Kolonel Inf. (Purn.) Alexander Evert Kawilarang untuk menumpas Andi Azis, sehingga pada saat itu terjadi peperangan dalam waktu yang cukup singkat. Akhirnya, pemberontakan Andi Azis pun berhasil ditaklukkan. Kemudian, Ir. P. D. Diapri yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri NIT mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan Andi Azis serta Sukawati sebagai Wali Negara NIT menyatakan bahwa NIT bersedia bergabung dengan NKRI. Pada 8 Agustus 1950, terjadi kesepakatan antara Kolonel Inf. (Purn.) Alexander Evert Kawilarang terhadap Mayor Jenderal Scheffelaar dari KNIL/KL berupa penghentian tembak menembak, KNIL/KL harus hengkang dari Makassar dan meninggalkan senjatanya. Seminggu kemudian, Andi Azis ditangkap dan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 15 tahun.

Contoh (lanjutan)

5. Republik Maluku Selatan (RMS)

- Latar Belakang →
Republik Maluku Selatan (RMS) adalah sebuah Republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan oleh seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT), yaitu Dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil pada 25 April 1950. RMS dikelola oleh pimpinan dari J.H Manuhutu sebagai Presiden, Dr. J.P. Nikijuluw sebagai Wakil Presiden, dan Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri.
- Tujuan →
Untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mempertahankan status Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) di Indonesia, dan menginginkan hanya Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) saja yang menjadi inti dari keamanan Negara RIS.

Contoh (lanjutan)

- Tindakan Penyelesaian →

Pengutusan Johannes Leimena, Politikus, Dokter, Pendeta, dan Wartawan oleh Pemerintah untuk menempuh jalur damai dengan mengadakan perundingan kepada RMS untuk bergabung di NKRI, namun ditolak. Pemerintah pun mengerahkan kekuatan militer yang dikomando oleh Kolonel Inf. (Purn.) Alexander Evert Kawilarang hingga terjadi perang antara kedua belah pihak. Hasilnya, Ambon berhasil dikuasai APRIS pada November 1950. Menanggapi kekalahan tersebut, RMS memilih meninggalkan kota pertahanannya dan melaksanakan perang gerilya. Akhirnya, Dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil ditangkap pada 12 Desember 1963 dan divonis hukuman mati pada 12 April 1966. Di sisi lain, Komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Soediarso gugur tertembak akibat pemberontakan tersebut.

Contoh (lanjutan)

6. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

- Latar Belakang →

Bermula dari kekecewaan angkatan militer daerah terhadap pusat, terutama di Pulau Sumatera dan Sulawesi mengenai rendahnya tingkat kesejahteraan dan ketidakadilan yang dialami warga sipil dan militer di wilayah tersebut. Pasalnya, hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi pemerintahan yang belum stabil di masa awal kemerdekaan. Kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya menimbulkan sentimen bahwa wilayah Sumatera dan Sulawesi "dianaktirikan", sehingga memicu upaya revolusi di daerah-daerah.

- Tujuan →

Secara perekonomian dan otonomi daerah, menuntut agar Pemerintah memperhatikan alokasi biaya pembangunan daerah untuk didistribusikan dengan adil dan merata. Selain itu, juga menuntut agar Kabinet Djuanda dibubarkan dan Dr. Ir. H. Soekarno kembali ke posisi konstitusionalnya.

Contoh (lanjutan)

- Tindakan Penyelesaian →

Pemerintah membentuk operasi gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Perang RI (APRI) untuk mengatasi pemberontakan PRRI/Permesta dengan cara gencatan senjata. Gerakan PRRI di Sumatera mampu dimusnahkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam waktu sekejap. Sementara itu, Permesta di Sulawesi juga dapat dipadamkan meskipun didukung bantuan dari Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dan Filipina. Akhirnya PRRI/Permesta mampu dilumpuhkan pada Agustus 1958. Selanjutnya, Dr. Ir. H. Soekarno membuka kesempatan kepada mantan anggota PRRI/Permesta pada 1961 untuk kembali ke NKRI dan diberikan amnesti.

Dampak

Jika terjadi disintegrasi, maka akan mengakibatkan banyak dampak negatif, yaitu:

1. Hubungan antar individu ataupun kelompok menjadi tidak harmonis.
2. Terjadinya diskriminasi.
3. Timbulnya situasi yang tidak aman dan tidak tentram.
4. Hilangnya nyawa dan rusaknya harta benda.
5. Meningkatnya angka kemiskinan.
6. Hilangnya rasa cinta terhadap tanah air, toleransi, serta persatuan dan kesatuan.
7. Memicu adanya Separatisme (paham atau gerakan untuk memisahkan diri dengan mendirikan negara sendiri).



Pencegahan

Guna menanggulangi terjadinya disintegrasi yang merugikan bangsa, berikut upaya yang dapat dilakukan:

1. Membangun kesadaran, komitmen, dan tindakan nyata dalam meningkatkan nasionalisme dan toleransi.
2. Perumusan hukum, kebijakan, maupun regulasi harus berdasarkan Pancasila dengan pelaksanaan secara disiplin dan tegas.
3. Melakukan penataan struktur dan sistem di sektor politik, ekonomi, dan lain-lainnya secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Membasmi Primordialisme (pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertama) dan Etnosentrisme (sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain).
5. Melestarikan budaya lokal dan selektif terhadap budaya asing.